

**ABSTRAK**

Upaya paksa merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki penyidik ataupun penuntut umum untuk mengurangi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, tentunya didasari pemberian kewenangan oleh Undang-Undang yang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya paksa diberi oleh undang-undang antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan pemanggilan. Dengan adanya hak untuk mengurangi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, maka hukum acara pidana Indonesia membuat suatu wadah untuk mengontrol upaya paksa tersebut dengan membentuk pranata praperadilan. Namun implementasinya pranata praperadilan ini hanya bersifat administratif, tanpa mereduksi pembuktian seperti ranah pokok perkara. Adanya permohonan Judicial Review atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan objek praperadilan, dalam Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menambahkan objek praperadilan yaitu penetapan tersangka, dengan alasan bahwa penetapan tersangka merupakan bentuk perkembangan upaya paksa.

**Kata Kunci : Upaya Paksa, Praperadilan, Mahkamah Konstitusi, Penetapan Tersangka.**

**ABSTRACT**

Coercive Act is a form of authority possessed by the investigator or prosecutor to reduce human rights are held by the suspect, certainly based on the granting of authority by the Act in this Book of the Law of Criminal Procedure (KUHAP). It given by law include arrest, detention, searches, seizure, examination of letters and court-call. With the right to reduce human rights are held by the suspect, KUHAP made a way to control the Coercive Act with the form called Pretrial Justice. However, the implementation of pretrial justice was just administratively, without reducing the realm of proof as the principal case. The application for judicial review of KUHAP against Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pretaining to the object of pretrial justice. In the verdict No. 21 / PUU-XII / 2014, Mahkamah Konstitusi adds the objects of pretrial justice named the determination of the suspect, the reason that the determination of the suspect is a form of Coercive Act.

**Keywords :** *Coercive Act, pretiral justice, Mahkamah Konstitusi, determination of suspect.*